

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Pranada media Group.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bhenyamin, Hoessein. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Djoko Prakoso. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Kamal, Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Miriam Budiarjo. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung.

Philipus M. Hadjon. 1997. *Tentang Wewenang*. Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun

XII

Reny Rawasita, et.al. 2009. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*.

Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada.

Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Yogyakarta: Universitas

Islam Indonesia.

Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia:

UI Press.

S.F Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*.

Yogyakarta: Liberty.

W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai

Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

C. Jurnal Penelitian

Harahap, Zairin. 2006. Pengaturan tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah. Jurnal Hukum. Universitas Islam Indonesia.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, URL:<https://pesselkab.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 10 September 2018 Pukul 20.23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, URL :<http://kbbi.web.id/ternak>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 Pukul 21.49 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, URL: <http://kbbi.web.id/pamongpraja.html> Diakses pada tanggal 27 Maret 2018 Pukul 17.21 WIB.

Website Resmi Kabupaten Pesisir Selatan, URL : <http://berita.pesisirselatankab.go.id> Diakses pada Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 17.32 WIB.

E. SUMBER LAINNYA

Katalog “Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka (*Pesisir Selatan Regency in Figures*)”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2017.

